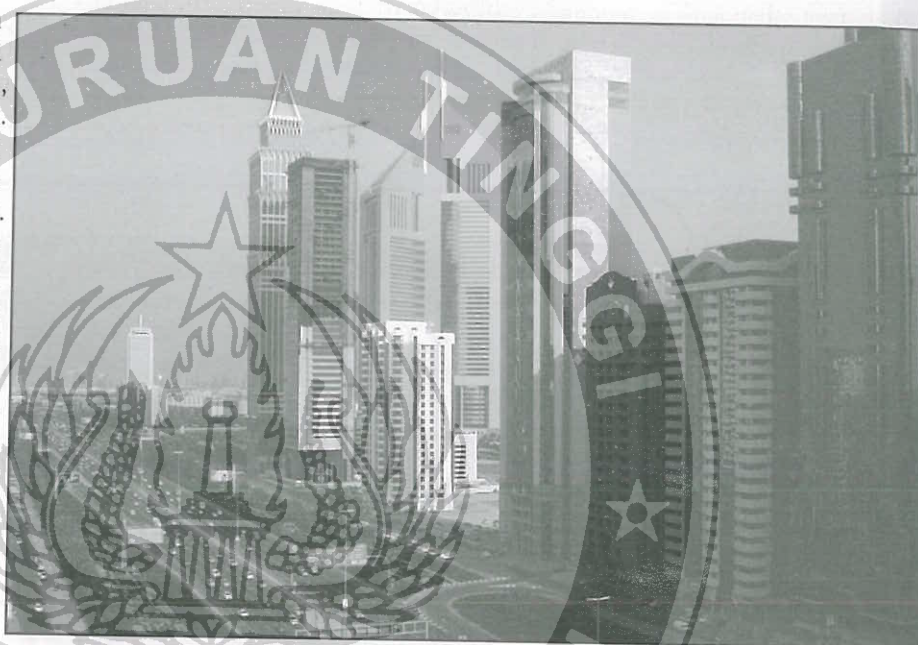




TIPS

Mengelola Keamanan Apartemen

KEAMANAN telah menjadi satu pertimbangan utama bagi penghuni apartemen dan kondominium, khususnya di kawasan perkotaan. Bukan hal yang mengejutkan kalau faktor "keamanan" menjadi nilai jual pengelola apartemen saat ini. Mengangkat faktor keamanan sebagai nilai jual sebenarnya bukan hal yang baru, karena fokusnya tetap pada menjaga konsistensi kondisi keamanannya. Mengutamakan keamanan dan keselamatan penghuni adalah tujuan utama sistem keamanan di apartemen. Teknologi yang muktahir juga perlu diperkenalkan ke penghuni untuk memperjelas alasan kenapa keamanan merupakan prioritas utama sistem keamanan.



Saat ini, tuntutan adanya fasilitas keamanan seperti sistem alarm, akses kontrol elektronik, pencahayaan yang cukup di tempat terbuka, dan keberadaan petugas patroli sekuriti, cukup diminati dan menjadi prioritas pilihan para penghuni khususnya penghuni pemukiman eksklusif.

Teknologi Keamanan. Kemajuan dalam teknologi keamanan telah membantu pengelola apartemen untuk memiliki tingkat pengamanan yang lebih baik dengan biaya operasional keamanan yang lebih rendah. Teknologi keamanan tidak identik dengan teknologi canggih atau teknologi terbaru, namun dilihat pada fungsi dan kegunaan. Misalnya, anda akan memilih sistem alarm canggih dan modern atau anjing penjaga berukuran besar di pekarangan? Keduanya punya fungsi sebagai alat penggentar untuk melawan pencuri sekalipun risikonya berbeda yakni suara alarm atau gigitan anjing.

a. **Akses Kontrol.** Salah satu bentuk pengamanan fisik yang dapat dilihat dengan mudah adalah akses kontrol yang terdiri dari pagar, gerbang utama, jendela, pintu, kunci, dan sistem pencahayaan tempat umum. Terlepas dari keberadaan petugas internal di lingkungan apartemen, penerapan akses kontrol merupakan hal pertama yang akan dicari oleh para penghuni ketika mereka melakukan penilaian kondisi keamanan sebuah lokasi properti

b. **Keamanan Gerbang Utama.** Gerbang otomatis dan pagar besi yang kokoh umumnya diaplikasikan sebagai bagian dari kontrol akses masuk. Kawasan hunian *cluster* kini banyak digemari oleh penghuni kelas atas dan hal ini dimanfaatkan dengan jeli oleh pengelola apartemen dengan mengenakan harga jual/sewa premium.

Keuntungan utama dari penguasaan sistem gerbang elektronik di kawasan hunian yang angka kejahatannya rendah adalah munculnya eksklusivitas dan jaminan keamanan. Kenyataannya, kini banyak masyarakat yang suka tinggal di kawasan yang dikelilingi pagar eksklusif sebagai kawasan hunian eksklusif yang memerlukan otorisasi untuk dapat masuk ke wilayah tersebut. Bagaimanapun juga, pengelola apartemen memanfaatkan pagar sebagai pengamanan untuk mencegah kemungkinan adanya pencuri yang masuk dan mengganggu para penghuni. Jika mengacu pada tujuan ini, maka skema yang dihasilkan akan memerlukan investasi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pagar menjadi pilihan utama karena lebih murah dibandingkan mempekerjakan petugas internal dalam jumlah besar. Jenis pagar yang

TIPS

dipasang sangat bergantung pada jenis bangunannya. Gerbang dua pintu memiliki fungsi yang lebih baik dibandingkan gerbang yang terbuka secara horizontal, namun biaya perawatannya mahal. Gerbang dua pintu memerlukan dua mesin operator untuk menggerakkan dua daun pintu, sehingga biaya perawatannya juga lebih mahal. Selain itu, gerbang dua pintu sering ditabrak oleh penghuni yang tidak sabar dalam mengendarai mobilnya.

c. **Sistem Akses Kartu.** Teknologi akses kartu merupakan teknologi terbaik untuk kunci pintu dan gerbang. Bagi bangunan berukuran besar yang baru selesai dibangun, ada baiknya menggunakan kunci kartu elektronik sebagai sistem akses dibandingkan menggunakan transmiter radio gerbang atau kunci pintu pelat baja. Program kunci kartu elektronik dapat disesuaikan dengan pembatasan wilayah akses bagi penghuni, pencatatan waktu, tanggal, dan lokasi yang diakses. Misalnya, kartu kunci akses akan diprogram dan mencatat kapan dan siapa penghuni yang menggunakan ruang olahraga, spa, kolam renang, atau lainnya, sehingga akan memberikan keuntungan ganda. Proses pemrograman kartu dapat dikoneksikan dengan sistem kamera video pengawas untuk menentukan siapa orang terakhir yang memasuki ruangan, gedung, atau berkendara melalui gerbang utama. Kartu akses dapat juga difungsikan sebagai kartu identitas penghuni dengan menambahkan foto. Kartu yang telah terprogram ini juga sesuai untuk mengawasi waktu kerja dan keberadaan karyawan, patroli keamanan lokasi gedung, dan membatasi akses ke wilayah-wilayah tertentu seperti kantor manager, ruang inspektur bangunan, ruang kendali utama.

d. **Pengendalian Kunci.** Dengan kartu akses elektronik, kendali kunci di

pintu-pintu ruang publik akan lebih mudah dikontrol secara efisien dan efektif. Jika sebuah kartu akses hilang atau penghuni pindah dari apartemen tersebut, maka kartu tersebut dapat dihapus datanya dari pusat sistem dengan mudah. Dengan demikian pengelola tidak lagi harus menggantikan kunci pintu manual atau memperbanyak kunci cadangan setiap kali terjadi perubahan penghuni apartemen.

e. **Pintu, Jendela, dan Kunci.** Pintu-pintu masuk dan jendela yang terbuka secara horizontal sebenarnya tidaklah sekuat yang diperkirakan. Akan tetapi, perkembangan teknologi telah mengembangkan kekuatan pintu dan jendela yang terbuka secara horizontal dengan memperkuat kosen/tiang pintu. Sekalipun kunci dengan mutu rendah masih banyak beredar di pasaran, kunci pintu hasil desain teknologi canggih kini juga banyak tersedia di toko-toko.

f. **Pencahayaan Kawasan Terbuka.** Pencahayaan merupakan sarana pengaman terpenting di waktu malam. Pencahayaan yang baik akan membuat penghuni merasa 'aman'. Pencahayaan yang baik akan mempermudah penghuni melihat nomor bangunan, memandu pejalan kaki, dan mengidentifikasi kemungkinan adanya ancaman di depan. Lampu terang dengan cahaya putih bersinar disarankan untuk pencahayaan di lapangan parkir yang terbuka dan luas. Sedangkan untuk lapangan parkir yang tertutup, dan trotoar, lampu fluorescent cukup baik untuk dipergunakan karena efisiensinya.

Petugas Internal dan Satpam. Apa perbedaan antara personil Satpam (sekuriti) yang berseragam dengan petugas internal di sebuah apartemen? Terlepas dari perbedaan nama, fungsi mereka sebenarnya sama. Para pengelola apartemen umumnya menggunakan istilah 'penjaga dalam' untuk menggantikan istilah

sekuriti di dalam apartemen. Ada pepatah yang mengatakan 'jika sebuah bebek terlihat seperti bebek, berjalan seperti bebek, berkotek seperti bebek, maka itu pasti bebek'. Realitanya memang petugas sekuriti yang bertugas di sekitar apartemen umumnya adalah petugas *outsourcing*, bukan petugas yang dikelola langsung oleh pengelola apartemen. 'Petugas dalam' yang berseragam berinisial yang dikelola langsung oleh pengelola apartemen dan umur mereka juga disediakan tempat tinggal di apartemen tersebut. 'petugas dalam' mungkin tidak berseragam rapi dan tidak menggunakan kaos dengan nama perusahaan atau nama apartemen.

Ada kelebihan dan kekurangan penggunaan jasa 'petugas dalam'. Keuntungan terbesar tentunya adalah petugas ini menetap di dalam wilayah apartemen sehingga mereka mengetahui lokasi dan para penghuninya dengan cepat. Para petugas ini umumnya membawa telepon genggam dan dapat merespon setiap panggilan penghuni dengan cepat. Kesediaan layanan prima menjadi ujung tombak keberadaan para petugas ini. Beberapa 'petugas dalam' ini bukan tidak mungkin pernah berdiskusi atau pensiunan kepolisian, sehingga mereka cukup terampil dan memiliki pengalaman.

Akan tetapi, jangan langsung berasumsi bahwa para petugas dari kepolisian memahami segala sesuatu mengenai keamanan apartemen. Keamanan lingkungan apartemen tidak diajarkan di Akademi Kepolisian. Hal yang sama berlaku bagi petugas yang berasal dari lingkungan sipil, di mana mereka memiliki sama sekali pengalaman mengenai hal pengamanan lokasi. Ini menandakan bahwa para petugas dari kalangan sipil perlu memperoleh pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu sebelum ditempatkan.

Jika para petugas memang diwajibkan menetap di dalam lokasi, maka mereka harus memiliki latar belakang yang memadai dan tidak memiliki catatan kriminal

Intinya adalah: jika anda akan mempercayakan kunci utama gedung ke petugas keamanan, anda tentu harus yakin bahwa anda menyerahkannya ke orang yang dapat dipercaya.

Personil Sekuriti Outsourcing. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, 'bagaimana saya dapat menemukan perusahaan *outsourcing* yang berkualitas dengan harga penawaran yang wajar dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas?' Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada beberapa hal yang perlu anda ketahui. Kalimat 'kualitas' dan 'harga yang wajar' adalah kalimat yang saling bertentangan maknanya. Selain itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa harga tidak selalu sesuai dengan kualitas layanan, dan ada kalanya personil sekuriti direkrut dari bursa kerja dengan mengesampingkan kualitas sekuriti yang direkrut.

Personil sekuriti seharusnya sudah melalui proses seleksi yang ketat dan berbagai tahapan sebelum ditempatkan di lokasi bisnis. Pada tahapan yang sederhana, referensi kerja dan catatan kriminal harus anda periksa berulang kali hingga anda yakin. Kenyataan lain adalah bahwa pekerjaan sebagai sekuriti umumnya dilakukan oleh banyak orang karena desakan hidup. Mereka memerlukan pekerjaan di kota setelah datang dari daerah terpencil. Anda harus menanyakan hal yang sama ke perusahaan penyedia jasa *outsourcing*, secara tertulis, sebagai bagian dari kontrak agar anda memperoleh layanan yang prima.

Sebagai saran awal, ada baiknya mencari perusahaan *outsourcing* yang cukup mapan dan besar dibandingkan perusahaan yang kecil. Perusahaan-perusahaan ini umumnya memiliki cadangan personil yang cukup banyak untuk menggantikan personil yang tidak cakap atau ditolak oleh anda. Di samping itu, perusahaan *outsourcing* besar umumnya memiliki kecenderungan untuk mempertahankan personil sekuriti dalam jangka panjang karena mereka akan menyediakan pelatihan dan pendidikan, sehingga memberikan insentif bagi personil itu

sendiri untuk mengejar karier.

Anda juga dapat meminta pola pelaksanaan patroli yang ketat sebagai standar yang tertuang dalam kontrak tertulis. Pola ini umumnya tertuang dalam 'Standard Operation Procedures (SOP)'. SOP harus dituangkan secara tertulis dan mendetail dan diberikan ke setiap petugas sebagai dasar dalam melaksanakan tugas di wilayah apartemen. 'Petugas dalam' umumnya juga memakai SOP, namun dalam bentuk jenis pekerjaan yang lebih detail.

SOP yang spesifik dapat meliputi, misalnya, waktu patroli satu jam jalan kaki—tiga kali semalam, antara jam 08:00 malam hingga 04:00 pagi. Pengelola harus meminta petugas patroli untuk mencatatkan aktivitas mereka secara mendetail. Jangan diterima bila laporan yang diserahkan berisi kalimat singkat seperti '10:00 atau 11:00 malam—kondisi aman.' Laporan yang mendetail dapat berisi, '10:06 malam—patroli di ruang penyimpanan paket, gerbang kolam renang, ruang *laundry*, dan kamar mandi. Semua pintu terkunci. Kondisi aman.'

BHAA Patroli berkendaraan yang hanya sesekali melewati kawasan apartemen sebenarnya tidaklah efektif jika petugas yang berpatroli tidak pernah turun dari kendaraannya. Patroli kendaraan sangat bergantung pada kemampuan jarak pandang sehingga harus berada di sekitar lokasi dalam jangka waktu yang cukup lama agar patroli dapat berjalan efektif.

Seleksi Penghuni. Proses penyaringan terhadap penghuni sebenarnya juga diperlukan untuk mencegah adanya penyusup. Proses ini dapat dilakukan dengan mendesakkan peraturan yang jelas dalam komunitas penghuni sewaktu calon penghuni mengisi aplikasi hunian. Mereka perlu memahami bahwa nyawa dan harta mereka sebenarnya juga akan berada dalam bahaya kalau mereka membawa orang yang tidak terdata atau berbahaya.

Proses identifikasi penghuni termasuk verifikasi kredit, pekerjaan, catatan penyewaan di tempat lain yang pernah

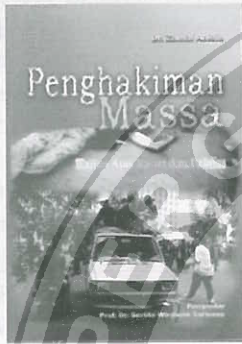
didiami, dan catatan kriminal bi Perencanaan identifikasi penghuni diterapkan pada semua penyewa di standar verifikasi yang sama. Kebanyakan anak kecil juga harus dihitung sebagai penghuni untuk mengukur kapasitas maksimum hunian. Akan tetapi kecenderungan saat ini bahwa proses seleksi calon penghuni lebih diarahkan pada kemampuan penyewa untuk membayar sewa apartemen. Kecenderungan apartemen-apartemen kini dihuni oleh orang-orang sebelumnya tidak teridentifikasi sebagai pengelola karena para pengelola menurunkan standar verifikasi minimum yang berkaitan dengan masalah keuangan penyewaan, pekerjaan, dan kemungkinan adanya catatan kejahatan.

Untuk menangani masalah penghuni ilegal di apartemen, terkadang pengelola harus bersikap tegas dengan mengosongkan ruangan yang disewakan memaksa penghuninya keluar dengan alasan perilaku penghuni yang mengganggu atau meresahkan penghuni lainnya. Di kalanya anda harus menetapkan standar yang lebih baik untuk para calon penghuni apartemen anda, dan menerapkannya secara perlahan tapi pasti.

Pada akhirnya, satu pertanyaan yang selalu menyedot perhatian adalah bagaimana anda membedakan penghuni ilegal dengan tamu kunjungan singkat. Jawabannya adalah pada sistem 'kunci' penghuni apartemen anda.' Ini sebenarnya sebuah misi pekerjaan yang tidak mudah apalagi jika jumlah apartemen yang disewakan di atas seratus unit. Peraturan yang diterapkan di komunitas apartemen perlu ditegaskan secara tertulis, bahwa penghuni harus memberikan laporan jika ada tamu yang akan menginap di apartemen sehingga memerlukan tempat parkir untuk kendaraannya. Pemecahannya tentu di tangan para pengelola apartemen untuk mendesain sistem yang cocok agar dapat mengenali semua penghuni apartemen (SJ)

Menguak Tabir Penghakiman Massa di Indonesia

Oleh: Anggoro Purwoto - staf redaksi Security Journal



Identitas Buku

Judul buku : Penghakiman Massa
(Kajian Kasus dan Pelaku)
Penulis : Dr. Zainal Abidin
Penerbit : Accompli Publishing, Mei 2005
Halaman : XIX + 262 halaman

ERA REFORMASI (pasca jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto, tahun 1998) di Indonesia membawa berbagai perubahan dalam masyarakat Indonesia. Salah satu perubahan yang nampak jelas terlihat ialah munculnya tindak kekerasan dalam bentuk main hakim sendiri. Aksi kejahatan dan kekerasan di berbagai daerah juga meningkat, sehingga Indonesia disebut oleh "New York Times" sebagai negara preman (*messy state*).

Buku yang ditulis oleh Zainal Abidin ini merupakan disertasi penulis atas penelitian yang dilakukannya mengenai masalah kekerasan dalam bentuk penghakiman massa ditinjau dari perspektif psikologi sosial, bidang ilmu yang digeluti oleh penulis. Tema yang diangkat oleh penulis dalam disertasinya ini merupakan tema baru yang diangkat berdasarkan peristiwa dan kejadian-kejadian main hakim sendiri yang semakin marak di masyarakat.

Di bagian awal buku ini, penulis menguraikan latar belakang terjadinya penghakiman massa dan kurun waktu

meningkatnya kasus-kasus penghakiman massa di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jadebotabek). Gambaran umum ini dikuatkan dengan tabel kasus-kasus penghakiman massa yang terjadi di wilayah Jadebotabek. Selain itu, penulis juga menguraikan komentar para ahli ilmu sosial berkaitan dengan aksi-aksi tersebut.

Kasus-kasus penghakiman massa yang terjadi pada tahun 1998 sampai 2002 meningkat sangat pesat, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Kasus penghakiman massa yang diulas oleh buku ini dibatasi pada kejadian yang menyebabkan korban tewas atau diduga telah tewas. Asumsinya, kasus-kasus seperti itu mempunyai tingkat kekerasan massa yang sangat tinggi dan ekstrem. Kasus-kasus demikian sangat penting diteliti untuk memahami alasan dan pengalaman orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pemilihan lokasi terjadinya kasus menjadi tanggung dari isi buku ini. Studi atas isi buku ini dilakukan penulis di pemukiman padat pinggiran kota, karena di daerah tersebut penulis mendapatkan beragam informasi tentang kasus-kasus penghakiman massa. Hal ini dimungkinkan karena baik pelaku maupun penonton pada umumnya bertepatan tinggal tidak jauh dari lokasi terjadinya penghakiman massa dan mereka telah saling mengenal satu sama lain. (hal.67)

Ada beberapa pertimbangan yang diungkapkan oleh Zainal Abidin berkaitan dengan lokasi studi kasus penghakiman massa. *Pertama*, kasus penghakiman massa merupakan kasus yang memiliki sensitivitas tinggi. Maksudnya, tidak mudah mendapatkan informasi dari para pelaku yang turut serta di dalamnya, mengingat tindakan tersebut pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap

Hak Asasi Manusia dan pelanggaran hukum. Para pelaku menyadari bahwa tindakan mereka salah sehingga mereka tidak berani mengungkapkan tindakan yang telah mereka lakukan karena mereka takut dikenai sanksi hukum. *Kedua*, pentingnya informan yang dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada penulis dalam proses penggalian *case*. Informan dibutuhkan karena para pelaku lebih mempercayai orang-orang di komunitasnya sendiri dibandingkan orang-orang di luar. *Ketiga*, berkaitan dengan variasi kasus. Pada kenyataannya, kasus penghakiman massa dapat dibagi dalam tiga bentuk, yakni spontan, tidak spontan, dan tidak spontan. Pada 4 literatur penelitian yang dijadikan studi oleh penulis, 3 unsur tersebut terpetakan sehingga dapat merepresentasikan karakteristik jenis kasus tersebut dan cukup merinci untuk dapat memahami tipologi kasus-kasus penghakiman massa.

Penulis menemukan beberapa dasar penghakiman massa dimulai dari peristilahan yang digunakan oleh beberapa pihak yang memiliki arti yang sama yakni "pengadilan jalanan" hingga "dimatiin massa". Penulis menguraikan tahap-tahap kekerasan dalam massa yang menjadi 'pembuka jalan' untuk mengetahui terjadinya penghakiman massa. Ada 3 tahap kekerasan yang ditemukan oleh penulis, antara lain: tahap *pra kekerasan* yang bervariasi dan karakteristik kasus. Tahap *kekerasan* yang sesungguhnya yang terjadinya pengeroyokan dan/atau pembakaran terhadap penjahat. Tahap *pascakekerasan* yakni tahap antiklimaks dari suatu penghakiman massa.

Penulis menguraikan karakteristik penghakiman massa pada ciri khas, proses, serta dinamika kasus-kasus tersebut

deskripsi tentang pengalaman para pelaku sebelum, pada saat, dan sesudah melakukan aksi-aksinya. Menggunakan istilah psikologi sosial, penghakiman massa muncul jika para pelaku mengalami *relative deprivation*, *mob identification*, dan *perceived law* yang negatif. Jadi, faktor yang menentukan terjadinya penghakiman massa ialah *perceived law enforcement* yang negatif. Namun, hasil penelitian yang kemudian dianalisis menunjukkan bahwa penghakiman massa muncul karena pelaku mengalami *perceived norm violation* yang negatif, *perceived law enforcement* yang negatif, dan *relative deprivation* yang tinggi. Namun, ketiga faktor yang dialami oleh para pelaku tersebut baru dapat diwujudkan dalam bentuk penghakiman massa, jika mereka berada dalam suatu massa dan mengalami *mob identification* yang tinggi. Faktor yang terakhir itulah yang ternyata paling menentukan karena tanpanya, ketiga faktor sebelumnya tidak mungkin bisa terjadi dalam penghakiman

massa. Penemuan penulis ini memberikan masukan baru bagi perkembangan psikologi sosial dan mematahkan teori yang telah berkembang. Penemuan tersebut membentuk *framework* baru mengenai beberapa faktor yang mendahului terjadinya penghakiman massa, bahwasanya seorang pelaku penghakiman massa akan melakukan tindakan penghakiman massa jika ia mengalami *perceived norm violation* negatif, *perceived law enforcement* yang negatif, *relative deprivation* yang tinggi, *perceived social support* yang positif dan *social learning* dari kasus-kasus yang serupa. Kelima faktor tersebut dapat terjadi jika diperantarai oleh *triggering factor* yang menyebabkan pelaku mengalami *mob identification* sesuai dengan *perceived social role* mereka. Penemuan baru lain yang ditemukan oleh penulis ialah adanya mekanisme pertahanan diri (*self defense mechanism*). Mekanisme pertahanan diri terbentuk setelah penghakiman massa selesai

dilakukan. Para pelaku mencari pembenaran diri atas perbuatan telah mereka lakukan dan dilakukan untuk menutupi perbuatan bersalah mereka atas perbuatan mereka lakukan (h. 231).

Aksi penghakiman massa di kota besar saat ini masih kerap terjadi kini. Buku ini setidaknya memberikan gambaran mengapa dapat bersikap beringas ketika berhasil menangkap pelaku kejahatan jalanan. Sekalipun kemungkinan terjadinya penghakiman massa dikurangi dengan rutinitas patroli dan himbuan keagamaan, tetapi seperti ini tetap menjadi barometer potensial di masyarakat yang meledak sewaktu-waktu ketika sudah berada di titik jenuh terhimpit beban sosial tingginya pengangguran sulitnya menembus akses ekonomi perkotaan.

Bersiap Menghadapi Undang-Undang Anti Pornografi

... dari halaman 27

Polda Metro Jaya sudah melarang peredaran majalah Playboy Indonesia di Ibukota, namun majalah yang memiliki nuansa pornografi tidak hanya Playboy Indonesia. Kedua, kemungkinan terbitnya edisi kedua majalah tersebut kini mulai menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Sejauh ini Pimpinan Redaksi Majalah Playboy Indonesia, Erwin Arnada, masih menolak memberikan tanggapan terhadap kemungkinan terbitnya edisi kedua. Ketiga, gejala yang kini muncul di Tangerang diperkirakan juga akan muncul di Depok pada tahapan pembahasan Perda Anti Pelacuran. Munculnya gejala sosial akibat penerapan Perda Anti Pelacuran yang serampangan dapat 'menularkan' ketegangan ke Ibukota menjelang proses sidang pembahasan RUU APP.

Ekses dari gangguan yang muncul akibat ketiga hal di atas tentunya adalah terganggunya roda bisnis akibat gangguan-

gangguan keamanan di Jakarta. Dalam dua minggu terakhir, kantor redaksi majalah Playboy Indonesia yang baru di kawasan Fatmawati Mas dijaga ketat oleh aparat keamanan. Para pedagang di sekitar kawasan Fatmawati Mas, dalam pengamatan *Security Journal*, mulai meragukan kondisi keamanan di sekitar kawasan tersebut, terlebih setelah munculnya aksi massa yang mengatasnamakan warga Fatmawati mengancam aksi kekerasan dalam menyampaikan aspirasi. Aksi massa ini jelas ditujukan bagi kelompok-kelompok yang selama ini bertindak keras dalam menentang Playboy Indonesia, terutama setelah aksi perusakan gedung *Asian Fertilizer*. Bukan tidak mungkin akan ada aksi perkelahian antara kelompok yang berniat menentang Playboy Indonesia dengan kelompok tersebut.

Selain di sekitar Fatmawati, ketegangan tentunya akan muncul di sekitar gedung DPR ketika proses pembahasan RUU APP

dilakukan pada akhir Mei 2006 hingga Juni 2006. Bentrokan antara kelompok yang pro dan kontra RUU APP kemungkinan tidak akan terelakarkan aparat keamanan tidak sigap dalam mengantisipasi kemungkinan hadirnya dua kelompok aksi massa dalam jumlah besar. Oleh karenanya persiapan dalam menghadapi kemungkinan adanya aksi-aksi massa yang bernuansa kekerasan perlu dilakukan sejak dini. Bukan tidak mungkin, setelah RUU APP disahkan menjadi Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, kelompok-kelompok yang selama ini mengampanyekan anti pornografi akan melakukan aksi pemeriksaan publik terhadap kios-kios, toko buku, dan swalayan, yang dituduh menjual tabung atau majalah porno. Aksi-aksi mereka tentunya tidak diharapkan oleh kalangan bisnis karena dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan baru dengan masyarakat. (SJ)